

**PENGARUH PESANTREN DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILKADA SUMATERA UTARA 2018
(STUDI KASUS PESANTREN AL KAUTSAR AL-AKBAR KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam

OLEH:

SEHATMAN AL-AKBAR HASIBUAN

NIM: 44144005



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PESANTREN DALAM MENINGKATKAN
ELEKTABILITAS CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PILKADA SUMATERA UTARA 2018
(STUDI KASUS PESANTREN AL KAUTSAR AL-AKBAR
KOTA MEDAN)**


Oleh:

SEHATMAN AL-AKBAR HASIBUAN
NIM. 44.14.4.005

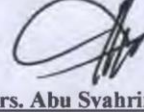
Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

Medan, 02 November 2018

Pembimbing I


Dr. Armin Nasution, MA
NIP. 19561217199103 1 003

Pembimbing II


Drs. Abu Svahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

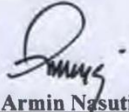
Nama : Sehatman Al-Akbar Hasibuan
NIM : 44.14.4.005
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren Al Kautsar Al-Akbar Kota Medan)

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat.

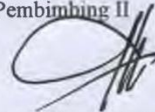
Medan, 02 November 2018

Pembimbing I



Dr. Armin Ngsution, MA
NIP. 19561217 199103 1 003

Pembimbing II



Drs. Abu Syahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEHATMAN AL-AKBAR HASIBUAN
NIM : 44144005
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Oktober 1994
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara
Alamat : JL. Pendidikan II Desa Sei Rotan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :
adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan
sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan
dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan



Sehatman Al-Akbar Hasibuan
NIM 44144005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren Al Kautsar Al-Akbar Kota Medan)"**. Nama : Sehatman Al-Akbar Hasibuan NIM : 44144005 Prodi : Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Muanaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 09 November 2018.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 09 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) FUSI UIN
Sumatera Utara


Ketua



Dr. H. Arifinsyah, M.Ag
NIP. 19680909 199403 1 004

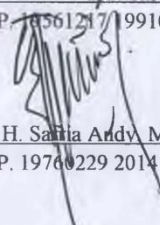
Sekretaris

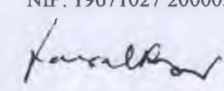

Drs. Muhammad Aswim, MAP
NIP. 19680817 200312 1 003

Anggota Penguji



1. Dr. Armin Nazution, MA
NIP. 19561217 199103 1 003


2. Drs. Abu Svahrin, M.Ag
NIP. 19671027 200003 1 002


3. Dr. H. Saifia Andy, MA
NIP. 19760229 201411 1 001


4. Faisal Riza, MA
NIP. 19820607 200912 1 004

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU


Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

ABSTRAK



Nama : Sehatman Al Akbar Hasibuan
Nim : 44144005
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Alamat : Jl. Pendidikan II, Desa Sei Rotan Medan
Judul : ***Peran Pesantren dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan)***

Pesantren merupakan suatu tempat untuk menimba ilmu agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri. Mengenai hubungan pesantren dan politik keduanya saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Ketika Pilkada, partai politik mencoba mencari dukungan ke berbagai pihak. Termasuk dua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara yang berusaha mencari dukungan dengan menjalin hubungan baik atau relasi dengan Pondok Pesantren al-Kautsar al-Akbar Kota Medan. Untuk itu penulis membahas Peran Pesantren dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa lapangan (*field research*).

Pesantren al Kautsar al Akbar merupakan salah satu pesantren di Kota Medan yang diasuh oleh KH Syech Ali Akbar Marbun, mempunyai 700-an santri aktif dan telah meluluskan santri sebanyak 26 angkatan sejak pertama kali berdiri. Secara sistem, Pesantren al-Kautsar al-Akbar menganut pondok modern. Tetapi dalam proses pengajaran dan pendidikan, kami menerapkan sistem salafiyah. Peran pesantren al Kautsar al Akbar dalam meningkatkan elektabilitas calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 terlihat dalam bentuk dukungan yang diberikan pesantren terhadap salah satu pasangan calon. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan tindakan nyata yang diberikan paslon buat umat Islam Sumatera Utara. Lewat dukungan tersebut nantinya akan berdampak kepada elektabilitas paslon dalam tingkat keterpilihannya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul : Pengaruh Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak berharap mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga, pertama kali kepada Ibunda tercinta Samidah Saragih dan Ayah tercinta Jalaludin Hassibuan yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua yang telah bersusah payah, mengasuh, mendidik, dan membiayai, mendoakan penulis sejak kecil hingga akhir perkuliahan ini. Namun hanya bakti dan doa yang mampu ananda berikan semoga ayahanda dan ibunda diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang murah serta dipanjangkan umurnya, serta telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Armin Nasution, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Abu Syahrin, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta jajarannya, Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap selaku ketua jurusan studi Pemikiran Politik Islam, Bapak/Ibu dosen di

4. lingkungan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU.
5. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN SU beserta seluruh jajarannya.
6. Bapak KH. Syech Ali Akbar Marbun selaku pendiri Pesantren dan H. Khairul Hani sebagai Ketua Yayasan Pesantren dan beserta jajarannya.
7. Teman-teman seperjuangan di Pemikiran Politik Islam: Addinul Huda Daulay, Evy Ermylayanti, Harja Wardoyo, Ida Royani Siregar, Ikhsan Faisal Angkat, Mardiana, Maulida, M. Muiz Wiramunte, Muklis Hasibuan, Nurul Qamariah, Rahmi Wardah hasibuan, Reni Andriani, Rida Putri Lidya, Sari Fatimah Azzahra M, Sehatman Al-Akbar Hasibuan, Tanwirul Manar, Tomy Supratama Solin, Yayank Dwi Utari, Yudhitya Sasmita.
8. Bukan sahabat biasa: Agung Aditama, Mardiana, Rida Putri Lidya, Tommy Supratama Solin, Succi Helsa, Sri Ayu, Rabiatal Khoiria, Tia Lestari, Rifka Ramudhin, Edi Sitepu, Anzari Ahmad, Miswan, Woni Hargi, Franz Leo, Ridho Ashaqi, Hendra Syahputra.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang akan dikerjakan selanjutnya bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 02 November 2018

Sehatman Al-Akbar Hasibuan
NIM. 44144005

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Pesantren.....	12
B. Pengertian Elektabilitas Politik.....	26
C. Hubungan Pesantren dan Elektabilitas Politik	30
D. Pilkada Sumatera Utara 2018.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Informan Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Instrumen Pengumpul Data.....	47
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Pesantren al Kautsar al Akbar Kota Medan.....	55
B. Pesantren dan politik	58
C. Peran Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018	62

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab “*Funduq*” yang berarti Hotel atau Asrama,¹ sedangkan menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.²

Mujamil Qomar dalam bukunya mengutip dari H.M. Arifin mengatakan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan model asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran atau madrasah sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.³

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki peran dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional. Oleh sebab itu, pesantren selalu berada dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik, sehingga tidak sedikit

¹Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gradsindo, 2001), hlm. 90

²Mastuhu, *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55

³Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2

pesantren yang akhirnya melibatkan diri dalam politik. Tingkat intensitas dan bentuk keterlibatan pesantren dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak, sebagaimana kita saksikan pada pelaksanaan momen-momen politik yang penting seperti pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Tradisi pesantren tentu saja mengurat akar dalam budaya Indonesia, sehingga wajar jika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut pesantren sebagai "sub-kultur" yang tak dapat diabaikan dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Membaca sejarah budaya Indonesia secara luas, tak mungkin melepaskan peran dunia pesantren dalam perkembangannya, karena ia menyatu dan memperani sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati kepada yang lebih tua atau menghargai yang lebih muda, ketaatan kepada orang tua yang melahirkan, toleransi dalam setiap perbedaan, bahkan bersikap "akomodatif" terhadap penguasa adalah "kultur" pesantren yang mewujud dalam relasi-relasi sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap "kultur sosial" kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengusung ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya.⁴

⁴*Ibid*, hlm. 3

Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik menarik dua kutub pendapat yang kontradiktif. Pendapat yang mengabsahkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, dan pendapat yang mengkritiknya sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik. *Pertama*, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren, bagaimana pun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis yang membenarkan pilihan politik praktis. Pendapat ini semakin kukuh apalagi didukung oleh realitas semakin banyaknya pemimpin pesantren (Kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak. *Kedua*, mengkritik dengan keras keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak bahaya daripada manfaatnya.⁵

Pondok pesantren Modern al-Kautsar al-Akbar adalah salah satu pondok pesantren besar di Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang berdiri sejak tahun 1978. Keberadaannya sangat di terima oleh masyarakat. Pesantren yang diasuh oleh KH Syech Ali Akbar Marbun ini mempunyai 700-an santri aktif dan telah meluluskan santri sebanyak 23 angkatan sejak pertama kali berdiri. Secara sistem, Pesantren al-Kautsar al-Akbar menganut pondok modern. Tetapi dalam proses pengajaran dan pendidikan, kami menerapkan sistem salafiyah. Dengan kolaborasi dua sistem tersebut, akan berdampak pada kualitas santri dan lulusannya. Santri tidak hanya dibekali ilmu-ilmu umum, tetapi juga mengkaji kitab-kitab karya ulama klasik secara aktif.

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Ibid, hlm. 22.

Dalam melaksanakan perannya, pesantren biasanya dipimpin oleh para Kiai. Para kiai ini umumnya memiliki kelebihan yang dipandang sebagai kharismatik atau keramat yang bersumber dari bakat yang dianugerahkan.⁶ Karena hal ini pesantren dengan para pimpinannya menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini biasanya yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan partai politik untuk merauk massa yang besar.⁷

Masyarakat dan pesantren tidak ubahnya dua sisi mata uang. Masing-masing saling bergantung dan peran memerani. Keberadaan dan situasi masyarakat akan memerani program di pesantren. Sementara itu, mekanisme pembinaan di pesantren sedikit banyak diperani oleh figur kiai. Dalam keadaan demikian, peran kiai terhadap perubahan sistem nilai masyarakat demikian besar. Kiai bahkan punya potensi untuk membolak-balik nilai baku yang telah berkembang sebelumnya.⁸

Dengan kondisi hubungan antara pesantren dan masyarakat di atas, maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh partai politik atau oknum politik untuk memperoleh elektabilitas di tengah-tengah masyarakat. Elektabilitas dalam politik berarti tingkat keterpilihan tokoh atau partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Di mana partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggtanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari partai ini adalah

⁶ M. Dian Nafi dkk, *Fraksi Pembelajaran Pesantren*, (Yogyakarta, Institute for Training and Development (ITD), (Forum Pesantren, Yayasan Selasih, 2007), hlm. 19.

⁷ Abdul Wahid Zaini, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996), hlm. 3.

⁸ Mastuhu, *Ibid*, hlm. 25.

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁹

Untuk mencapai tujuannya, partai politik membutuhkan dukungan dalam pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan peran terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implemetasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.¹⁰ Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.¹¹ demikianlah gambaran pemilihan pemimpin di dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifahtullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 403-404.

¹⁰ Siti Zuhro dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 48.

¹¹ Dede Mariana & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 32.

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah: 30)*¹²

Saat ini daerah sedang gencar-gencarnya melakukan Pilkada, berbagai partai politik mencoba mencari dukungan ke berbagai pihak. Termasuk dua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara yang berusaha mencari dukungan dengan menjalin hubungan baik atau relasi dengan Pondok Pesantren al-Kautsar al-Akbar Kota Medan. Lantas pertanyaan besarnya adalah sejauh mana peran pesantren al-Kautsar al-Akbar terhadap elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.

Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur melihat pesantren sebagai wadah dalam meningkatkan elektabilitas mereka di masyarakat. Selain karena pesantren merupakan tempat agamis, tempat yang mudah mendulang simpati dan empati masyarakat maupun jajaran pesantren (santri dan alumninya), juga sebagai tempat untuk mencari dukungan kyai. Karena kyai merupakan pusat dari kegiatan yang ada dalam pesantren tersebut.

Secara pribadi, penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan tema penelitian ini merupakan satu-satunya di jurusan Pemikiran Politik Islam FUSI yang menelusuri elektabilitas elite politik di pesantren. Lalu penelitian ini merupakan sesuatu yang masih hangat dan baru, mengingat pilkada Sumatera Utara di laksanakan beberapa bulan yang lalu.

¹² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2010). hlm.24

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Pesantren dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018.

Sementara manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian mengenai peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada sumatera utara 2018 dan juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tengah-tengah masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Dari judul di atas, ada beberapa istilah yang perlu di batasi pengertiannya agar istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut menjadi jelas dan tidak memberikan

salah pengertian maupun tafsiran ganda, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³
2. Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.¹⁴
3. Elektabilitas adalah keterpilihan, tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan.¹⁵ Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik.
4. Pemilihan kepala daerah Sumatera Utara adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan begitu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah, secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 375.

¹⁴ *Ibid*, hlm.378

¹⁵ *Ibid*, hlm.157

¹⁶ Dede Mariana & Caroline Paskarina, *Ibid*, hlm. 15.

Adapun maksud dari penelitian yang berjudul “Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan)” ialah suatu penelusuran ilmiah tentang Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Sumatera Utara 2018.

E. Kajian-Kajian Terdahulu

Dari literatur-literatur yang ada, tampaknya kajian tentang Komisi Pemilihan Umum telah banyak dilakukan, baik mengenai kinerja, peran, maupun aspek lainnya.

Di antara karya-karya yang membahas tentang peran pesantren terhadap politik dari berbagai sudut pandang adalah penelitian Rofiatu Rosida, mahasiswi jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul “*Kiai dan Partai Politik (Fenomena mobilisasi santri dalam PKNU 2009 di Pondok Suci Manyar Kabupaten Gresik)*”.¹⁷

Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang berada di desa Suci kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melakukan mobilisasi terhadap para santri yang berada di pondoknya, hal itu dilakukan karena PKNU merupakan partainya para ulama yang sengaja di dirikan para ulama untuk ikut serta berkontribusi terhadap bangsa dan agama melalui jalur politik.

Jika dilihat dari persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini maka sama-sama menggunakan metode kualitatif yang cara memperoleh datanya adalah dengan melakukan obsevasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara

¹⁷ Rofiatul Rosida, *Kiai dan Partai Politik*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

dengan orang-orang yang terkait dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam hubungan agama dan politik.

Lalu penelitian yang kedua dari Eri Kusumawati mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, yang berjudul “*Kiai dan Politik Praktis (Studi atas keterlibatan politik Kyai dalam masyarakat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang)*”.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan dan mendeskripsikan hubungan Kyai dan Santri dalam politik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang.

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini berbeda karya-karya yang disebutkan di atas. Penelitian ini difokuskan pada peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018.

¹⁸ Eri Kusumawati, *Kiai dan Politik Praktis*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan ke dalam V (lima) bab. Setiap bab akan dibagi kepada beberapa sub bab yang memiliki kesinambungan agar pembahasan lebih sistematis. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari: Pengertian Pesantren, Pengertian Elektabilitas Politik, Hubungan Pesantren dan Elektabilitas Politik, Pilkada Sumatera Utara 2018

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpul Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Gambaran umum Lokasi Penelitian, Pesantren dan politik, Peran Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Analisis.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pesantren

Keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat Indonesia selama berabad-abad sampai sekarang membuktikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendidikan agama yang diberikan di sana. Apalagi kalau diingat bahwa pesantren-pesantren yang bertebaran di seluruh Indonesia sama atau hampir sama kepunyaan kyai dan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepunyaan pemerintah.¹⁹

Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Pondok berarti bangunan untuk menimba ilmu agama. Dan perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Sebagaimana asal usul kata santri yang dikutip Yasmadi dalam pandangan Nur Cholis Madjid dapat dilihat dari dua pendapat:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari perkataan “sastri” sebuah kata dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nur Cholis Madjid agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas literasi bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab.²⁰ Di sisi lain Zamarkhsari Dhofier berpendapat, kata santri dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Atau secara umum dapat

¹⁹ Mastuhu, *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55

²⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 6

diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata “cantrik” berarti seorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru ini menetap.

Pengertian terminologi pesantren di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Dari sinilah barangkali Nur Cholis Madjid berpendapat sebagaimana yang dikutip Yasmadi, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, memang cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya.²¹

M.A. Hasan dan Mukti Ali juga mengutip pendapat dari Manfred bahwasanya, pesantren berasal dari masa Islam serta mempunyai kesamaan dengan Budha dalam bentuk asrama. Pendapat lain menyatakan bahwa pondok pesantren adalah pranata pendidikan asli Islam. Pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang berkembang di beberapa wilayah Islam seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, yang dikenal dengan sebutan *Zawiyat*. Dan pondok pesantren menurut M. Arifin sebagaimana yang dikutip Mujamil Qomar berarti: Suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau

²¹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 61-62.

beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independent dalam segala hal.

Penyebutan kata pondok pesantren dianggap kurang jami' mani' (singkat-padat). Selagi pengertiannya dapat diwakili istilah yang lebih singkat. Para penulis lebih cenderung menggunakannya dan meninggalkan istilah yang panjang. Maka pesantren lebih tepat digunakan untuk menggantungkan pondok dan pondok pesantren. Lembaga research Islam (pesantren luhur) mendefinisikan pesantren: "Suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran-pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya".

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan suatu tempat untuk menimba ilmu agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri.²²

1. Sejarah Pesantren

Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya Jawa, tidak berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan bentuk asrama agama Budha mandala atau asyrama yang ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam. Karenanya tidak heran jika sistem pendidikan pesantren dibanggakan sebagai alternatif yang otentik terhadap sistem kolonial dalam suatu perdebatan yang terjadi di saat pergerakan nasional telah mencapai usia lanjut.

²² *Ibid*, hlm. 61-62.

Sebagai institut pendidikan Islam yang dinilai paling tua, pesantren memiliki akar transmisi sejarah yang jelas. Orang yang pertama kali mendirikan pesantren dapat dilacak meskipun ada sedikit perbedaan pemahaman. Di kalangan ahli sejarah terdapat perselisihan pendapat dalam menyebutkan pendiri pesantren pertama kali. Sebagian mereka menyebutkan Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal dengan Syaikh Maghribi, dari Gujarat, India, sebagai pendiri atau pencipta pondok pesantren di Jawa. Muh. Said dan Junimar Affan menyebut sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Kembang Kuning Surabaya. Bahkan Kyai Makhrus Aly menginformasikan bahwa di samping sunan Ampel (Raden Rahmat) Surabaya ada ulama yang menganggap sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama, sewaktu mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam khalwat, beribadah secara istiqomah untuk ber-taqarrub kepada Allah.²³

Mengenai teka-teki siapa pendiri pesantren pertama kali di Jawa khususnya agaknya analisis lembaga research Islam (pesantren luhur) cukup cermat dan dapat dipegang sebagai pedoman. Dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim sebagai peletak dasar pertama sendi-sendi berdirinya pesantren, adanya Imam Rahmatullah (Raden Rahmat atau sunan Ampel) sebagai wali pembina pertama di Jawa Timur.

Jika benar pesantren telah dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim sebagai penyebar Islam pertama di Jawa maka bisa dipahami apabila para peneliti

²³ Mastuhu, *Ibid*, hlm.57

sejarah dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa pesantren adalah suatu model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia.

Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut sumber bukti yang terbaru, Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke 7 M/ 1 H dibawa oleh pedagang dan mubaligh dari negeri Arab.
- b. Daerah yang pertama di masuki ialah pantai barat pulau Sumatra yaitu di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pasai.
- c. Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan, dan proses itu berjalan damai.
- d. Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada perlawanan rakyat melawan penjajah bangsa asing dan daya tahannya mempertahankan daya tahan tersebut selama zaman penjajagan Barat dalam waktu 350 tahun.²⁴

Pada awal rintisannya, pesantren bukan hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga dakwah. Justru misi yang kedua ini lebih menonjol. Lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini selalu mencari lokasi yang sekiranya dapat menyalurkan dakwah tersebut tepat sasaran, sehingga terjadi

²⁴ Hasan Langgulung, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 91-92.

benturan antara nilai-nilai yang dibawanya dengan nilai-nilai yang telah mengakar dalam masyarakat setempat. Lazimnya, baik pesantren yang berdiri pada awal pertumbuhannya pada abad ke-19 dan ke-20 masih juga menghadapi kerawanan-kerawanan sosial dan keagamaan pada awal perjuangannya. Pesantren berjuang melawan perbuatan maksiat seperti perkelahian, perampokan, pelacuran, perjuduan dan sebagainya. Akhirnya pesantren berhasil membasmi maksiat itu, kemudian mengubahnya menjadi masyarakat yang aman, tentram dan rajin beribadah. Selain itu terkadang pesantren juga menghadapi penyerangan penguasa yang merasa tersaingi kewibawaannya. Sebagai contoh, Raden Paku (sunan Giri) sewaktu merintis pondok pesantren di Kedaton pernah terancam rencana pembunuhan atas perintah raja Majapahit (Prabu Brawijaya).

Giliran selanjutnya, pesantren berhadapan dengan tindakan tiran kaum kolonial Belanda. Imperialis yang menguasai politik, ekonomi dan militer juga mengemban misi penyebaran Kristen. Bagi Belanda pesantren merupakan antitesis terhadap gerak Kristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat. Anggapan demikian adalah sebagai basis argumentatif baginya untuk menekan pertumbuhan pesantren. Mujamil Qomar mengutip pendapat Sutari Imam Burnadib bahwa penjajah malah menghalang-halangi perkembangan agama Islam sehingga pondok pesantren tidak dapat berkembang secara normal. Bahkan pada 1882 Belanda membentuk "*Pristeranden*" yang bertugas mengawasi pengajaran agama di pesantren-pesantren. Kurang lebih dua dasawarsa kemudian, dikeluarkan ordonasi 1905 yang bertugas mengawasi pesantren dan mengatur izin bagi guru-guru agama yang akan mengajar. Pada tahu 1925 dikeluarkan aturan

yang membatasi pada lingkaran kini tertentu yang boleh memberikan pelajaran mengaji. Dan pada tahun 1938 keluar lagi aturan yang terkenal dengan ordonasi sekolah liar (*widle School Ordonantie*) yang berupaya memberantas serta menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah.

Kemudian pada awal penjajahan Jepang, pesantren berkonfrontasi dengan imperialis baru ini, lantaran penolakan kyai Hasyim Asyari kemudian diikuti kyai-kyai pesantren lainnya terhadap saikere (penghormatan terhadap kaisar Jepang Tenno Haika sebagai keturunan dewa Amaterasu) dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pukul 07.00, sehingga mereka ditangkap dan di penjara Jepang. Ribuan santri dan kyai berdemonstrasi mendatangi penjara, kemudian membangkitkan dunia pesantren untuk memulai gerakan bawah tanah menentang Jepang.²⁵

Kemudian pada masa kemerdekaan, pesantren merasakan nuansa baru. Kemerdekaan merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih bebas, terbuka, dan demokratis. Rakyat menyambut munculnya era pendidikan baru yang belum dirasakan sebelumnya tekanan-tekanan politik penjajah. Mereka bersemangat mendorong anak-anak usia sekolah agar menempuh pendidikan. Sedang pemerintah membuka saluran-saluran pendidikan yang pernah tersumbat ketika Belanda dan Jepang menguasai Indonesia.²⁶

Tetapi kurun ini merupakan musibah paling dahsyat yang mengancam kehidupan dan kelangsungan pesantren. Hanya pesantren-pesantren besar yang

²⁵ Ahmad Patoni, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 42.

²⁶ Ahmad Patoni, *Ibid*, hlm. 42.

mampu menghadapinya dengan mengadakan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional sehingga musibah itu dapat direndam. Maka pesantren-pesantren besar masih bertahan hidup, selanjutnya memperani bentuk dan membangkitkan pesantren-pesantren kecil yang mati, yang klimaksnya terjadi pada tahun 1950-an. Akhirnya pendidikan yang menjadi andalan Islam tradisional ini pulih kembali. Kehidupan pesantren relatif normal pada masa Order Baru, namun pada masa 1970-an bersamaan dengan suburnya sekularisasi, musibah tersebut mengguncang pesantren lagi. Jadi secara umum, pada masa Orde Konstitusional, pesantren dapat hidup dan berkembang dengan baik bahkan belakangan ini berkembang dengan sangat pesat dengan berbagai variasinya. Keadaan yang membaik ini disokong oleh pergeseran strategi dakwah Islam dari pendekatan ideologis ke arah pendekatan kultural.

Demikian perjalanan kehidupan pesantren, yang melewati berbagai rintangan sehingga banyak memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dan mampu bertahan sampai sekarang.²⁷

2. Tujuan Pesantren

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan, di samping faktor-faktor lainnya yang terkait: pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Keberadaan faktor ini tidak ada artinya bila tidak diarahkan oleh suatu tujuan. Dan tujuan menempati posisi yang amat penting

²⁷ Mujamil Qomar, *Ibid*, hlm. 7

dalam proses pendidikan sehingga materi, metode, dan alat pengajaran selalu disesuaikan dengan tujuan. Tujuan yang tidak jelas akan mengaburkan seluruh aspek tersebut.

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sedikitnya mengandung 10 unsur, yaitu bertujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
- c. Manusia yang beriman
- d. Manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur
- f. Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
- g. Sehat jasmani
- h. Sehat rohani
- i. Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri
- j. Manusia yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan bangsa

Adapun tujuan pendidikan agama Islam menurut beberapa ahli atau tokoh pendidik Islam yang dikutip Ahmad Patoni adalah:

- a. Imam Al-Ghozali mengatakan tujuan pendidikan agama Islam yang hendak dicapai adalah:

Pertama, kesempurnaan manusia, yang puncaknya adalah dekat dengan Allah. Kedua, kesempurnaan manusia yang puncaknya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jadi menurut al-Ghozali ada dua tujuan pendidikan yang ingin dicapai sekaligus, yaitu kesempurnaan manusia yang bertujuan mendekatkan diri (dalam arti kualitatif) kepada Allah SWT. Kesempurnaan manusia yang dimaksud adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk menjadikan insan kamil (manusia pari purna) tidaklah tercipta dalam sekejap mata, tetapi mengalami proses yang panjang dan ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi diantaranya mempelajari berbagai ilmu, mengamalkannya dan menghadapi berbagai cobaan yang mungkin terjadi dalam proses kependidikan itu.²⁸

b. Muhammad Athiyah al-Abrasi mengemukakan tujuan pendidikan Islam secara umum, ialah:

- 1) Untuk membantu pembentukan akhlak mulia
- 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
- 3) Persiapan mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah (scietific spirit) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri
- 5) Menyiapkan pelajaran dari segi profesional, teknis, supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan tertentu agar ia dapat mencapai rizki dalam hidup di samping memelihara kerohanian

²⁸ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 184-185.

- c. Menurut Ahmad D. Marimba dalam bukunya “pengantar filsafat pendidikan Islam”, menyatakan tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim

Dari beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia muslim secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan perasaan dan panca indera, sehingga memiliki kepribadian yang utama. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia baik spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, keilmiahannya, bahasanya, baik secara kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu kearah kebaikan atau kesempurnaan hidup. Atau dengan uraian singkat dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan taraf kehidupan manusia melalui seluruh aspek-aspek yang ada sehingga sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan proses tahap demi tahap. Dan manusia akan dapat mencapai kematangan hidup setelah mendapatkan bimbingan dan usaha melalui proses pendidikan.

Pesantren memiliki tujuan institusional yang lebih luas dengan mempertahankan hakekatnya dan diharapkan menjadi tujuan pesantren secara nasional. Pernah diputuskan dalam masyawarah atau lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren di Jakarta yang berlangsung pada 2 sampai dengan Mei 1978.

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik siswa atau siswi anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa atau santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan atau masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual.
- f. Mendidik siswa atau santri untuk membangun meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.²⁹

²⁹ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 154.

3. Elemen Pokok Pesantren

Pesantren itu terdiri dari lima elemen pokok, yaitu:

- a. Kyai, Keberadaan seorang kyai dalam lingkungan sebuah pesantren laksana jantung bagi kehidupan manusia. Dan kyai juga menjadi publik figur pesantren. Kyai disebut alim apabila ia benar-benar memahami, mengamalkan, dan memfatwakan kitab kuning. Kyai demikian ini menjadi panutan bagi santri pesantren bahkan bagi masyarakat Islam secara luas. Misalnya, manuver-manuver yang ditampilkan Nahdlatul Ulama selalu dihubungkan dengan kekuatan pesantren yang memiliki massa fanatik dibawah komando kyai. Kharismatik seorang kyai tersebut terkait dengan kekuatan magis pada pribadinya.
- b. Santri, Pondok pesantren menampung santri mukim dan santri kalong. Santri mukim yaitu santri yang belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok. Sedangkan santri kalong adalah santri yang bertempat tinggal di asrama pondok tapi belajar di madrasah atau sekolah umum di luar pesantren. Pondok pesantren dapat dibedakan berdasarkan jumlah santrinya. Disebut pesantren besar kalau jumlah santrinya di atas 5.000, jika jumlah santri mencapai 3.000-5.000, disebut menengah. Jika jumlah santrinya antara 1.000-3.000 biasanya disebut sedang. Dan jika santrinya kurang dari 1.000 biasanya disebut pesantren kecil.
- c. Masjid, Masjid adalah sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Masjid merupakan sentra sebuah pesantren karena di sinilah pada tahap awal bertumpu seluruh kegiatan di lingkungan pesantren, baik yang

berkaitan dengan ibadah, shalat berjamaah, zikir, wirid, do'a, i'tikaf dan juga kegiatan belajar mengajar. Menurut Zamakhsari Dhofier dalam bukunya Yasmadi berpendapat bahwa, kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dasar sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusa pada masjid sejak masjid Al-Quba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad tetap terpancar dalam sistem pesantren.

- d. Pondok, Pondok dalam sejarahnya menunjukkan simbol kesederhanaan. Artinya pondok-pondok untuk penginapan santri itu dibangun karena kondisi jarak antara santri dan kyai cukup jauh, sehingga memaksa mereka untuk mewujudkan penginapan sekadarnya dalam bentuk bilik-bilik kecil di sekitar masjid dan rumah kyai.
- e. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik, Penggalian hasanah budaya Islam melalui kitab-kitab klasik salah satu unsur yang terpenting dari keberadaan dari sebuah pesantren dan yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya. Dalam realisasi empiris ternyata peran kitab-kitab salaf atau kitab kuning merupakan pusat ilmu pengetahuan yang sangat besar dalam dinamika pesantren.³⁰

³⁰ Husni Rahim, *Ibid*, hlm. 158.

B. Pengertian Elektabilitas Politik

Elektabilitas memiliki arti ketertarikan seseorang dalam memilih. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.³¹

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang

³¹ Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 32.

ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Terkadang pengertian elektabilitas kerap disalahartikan menjadi pengertian popularitas. Padahal popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Meskipun populer, belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui public, maka rakyat tidak memilih.³²

Popularitas seseorang dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung seseorang untuk memperoleh kekuasaan. Pemilihan Umum, Pilpres, serta Pemiluada kepopuleran seseorang calon atau kontestan sangat mendominasi dan menentukan bagi pilihan ditentukan oleh rakyat. Dengan adanya modal popularitas maka akan lebih mudah bagi seseorang atau figur tersebut untuk mencuri perhatian masyarakat, melalui pemberitaan media yang diharapkan nantinya akan mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan atau mendongkrak elektabilitas. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dibangun pencitraan yang baik ditengah masyarakat, agar nantinya timbul simpati dan keberpihakan masyarakat kepada tokoh atau figur tersebut. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan.

Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil

³² Nimmo, *Ibid*, hlm. 32.

meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk memperani orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.³³

Elektabilitas dapat ditingkatkan dengan pencitraan politik. Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik.

Pencitraan politik sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Corner dan Pels mencatat baik figur yang bersih maupun bermasalah (notorious) secara substansial bekerja keras membangun citra politik untuk memperani pemilih, karena citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye

Pencitraan sosok atau figur tertentu bukan hanya menjadi monopoli para pemilik saham stasiun televisi, tetapi juga terjadi dilakukan oleh orang luar yang mempunyai kekuatan modal kuat untuk membangun suatu politik pencitraan terhadap sosok tertentu yang didukung oleh pemilik saham. Tentunya diharapkan akan dapat memberi keuntungan dikemudian hari bila sosok tersebut benar-benar berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan

³³ *Ibid*, hlm 33.

partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.³⁴

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.³⁵

C. Hubungan Pesantren dan Elektabilitas Politik

³⁴ Azyumardi Azra, *Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia*, (Indo Islamika, 2012), hlm. 235.

³⁵ *Ibid*, hlm. 34

Daya tarik pesantren sebagai sebuah *magnitude* politik apalagi di saat-saat menjelang kontestasi tak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan, pesantren semakin menarik untuk dilirik, karena suara mereka yang cukup signifikan perannya dalam memetakan kecenderungan pilihan politik mereka. Jika ada pandangan *suara rakyat suara Tuhan*, maka berlaku dalam dunia pesantren, *suara kiai suara santri*.

Hal ini sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, terlebih jika setiap pemimpin pesantren terafiliasi dengan berbagai kekuatan politik yang ada. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benar-benar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah sejak dulunya berkelindan, saling membutuhkan.

Pesantren tidak saja menarik secara politik, namun juga perwujudan dari satu-satunya model pendidikan paling yang ada di Nusantara, sehingga selalu menarik para pemerhati sosial yang ingin mengungkap secara utuh tradisi dan kultur masyarakat Indonesia. Akulturasi budaya dan agama yang saat ini masih tetap utuh, hanya dapat dirasakan dan diwujudkan dalam dunia pesantren, selain itu, tak ada lagi cerminan budaya Nusantara yang terikat dalam mata rantai panjang seperti tradisi pesantren. Itulah kenapa, Karel A Steenbrink menyebut "pesantren" erat kaitannya dengan istilah "priesterscholen" atau sekolah calon "pastor Islam". Gambaran pesantren masa lalu, memang mirip dengan "sekolah kepasturan" yang mendidik dan membentuk sosok-sosok manusia yang ahli dalam bidang agama, khususnya agama Islam.

Tradisi pesantren tentu saja mengurat akar dalam budaya Indonesia, sehingga wajar jika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut pesantren

sebagai sub-kultur yang tak dapat diabaikan dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara. Membaca sejarah budaya Indonesia secara luas, tak mungkin melepaskan peran dunia pesantren dalam perkembangannya, karena ia menyatu dan memperani sikap, prilaku, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati kepada yang lebih tua atau menghargai yang lebih muda, ketaatan kepada orang tua yang melahirkan, toleransi dalam setiap perbedaan, bahkan bersikap "akomodatif" terhadap penguasa adalah "kultur" pesantren yang mewujud dalam relasi-relasi sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap kultur sosial kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengusung ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya.³⁶

Pesantren dan politik seakan berkait menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Pesantren tentu saja butuh pengakuan secara politik sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya di tengah masyarakat budaya. Identitas kesantrian yang mewujud dalam diri para politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, atau para aktivis sosial menjadi sangat penting dan berperan di tengah kecenderungan yang masih kental

³⁶ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2.

terhadap perspektif politik aliran yang sampai saat ini masih belum juga memisahkan diri dari ruang-ruang budaya politik.³⁷

D. Pilkada Sumatera Utara 2018

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “Semua orang warga

³⁷ A.M. Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Pendidikan Islam dan Dakwah*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 161.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ikrar Mandidrabadi , 2008), hlm 35

Negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.” ini adalah prinsipnya.³⁹

Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin di daerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis. Dalam penjelasan Undang- undang No.32 Tahun 2004 pasal 24 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota.

Seseorang yang berminat atau ingin menjadi kepala daerah mencari dukungan dari salah satu atau beberapa basis partai. Gunanya untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat untuk mendaftarkan diri kepada pengurus partai guna dicatat sebagai salah satu bakal calon (Balon) kepala daerah. Sesudah itu, masing-masing harus mencari dukungan yang lebih luas agar mendapat suara mayoritas dalam pemilihan calon. Tentu saja kepala daerah dan wakilnya, bisa memperoleh dukungan lewat berbagai cara seperti bujukan, persetujuan ataupun manipulasi.

Disamping itu, tiap bakal calon juga harus mempersiapkan kertas kerja untuk dipresentasikan dalam sebuah “debat publik” intern partai.yang kenyataannya tidak lebih dari show, karena memang tidak pernah terjadi perdebatan yang sesungguhnya karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Setelah proses tersebut dilalui, ditetapkanlah calon kepala daerah untuk

³⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 2010), hlm. 43-44

diajukan kepada DPRD yang prosedurnya relatif sama dengan proses penyaringan bakal calon menjadi calon tetap. Bedanya, ada tahap akhir pemilukada yaitu masing-masing calon harus mengikuti fit and proper test di depan tim atau pleno DPRD.⁴⁰

1. Pengertian Pemilu Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota DPR . Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan begitu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah, secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif. (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).⁴¹

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni asas bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 50.

⁴¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepada Daerah Langsung*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 98

integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.⁴²

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau

⁴² *Ibid*, hlm. 64

pilkada, memilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap memilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁴³

Menurut Tatang Chimad pada prinsipnya pemilihan umum dalam ranah demokrasi bermakna:⁴⁴

- a. Kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan begbagai pihak.
- b. Sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dimana terjadi perwakilan prnrntu akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat.
- c. Sirkulasi para elit politik yang berujung pada perbaikan performa eksekutif.

Pemilu sebagai wujud dari demokrasi bertujuan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum. Memilih sebagian rakyat menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seharusnya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang yang terpilih menjadi pemimpin. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutan menjadi pemilihan. Dalam pemilihan itu semua rakyat harus ikut,

⁴³ *Ibid*, hlm. 70

⁴⁴ Tatang Chidmad, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, (Jogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 3.

tanpa membedakan, maka dengan itu dipakailah sebutan pemilihan umum atau disingkat Pemilu.⁴⁵

2. Syarat-Syarat Pemilu yang Demokratis

- a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat politis dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu
- b. Ada keluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan atau Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikan perkembangan real aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan dari aspirasi ini.
- c. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak top down (diturunkan oleh elit partai dan penguasa, dari atas), melainkan bottom up (berdasarkan inisiatif mandiri dan aspirasi dari bawah)/ praktik dropping calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan. Seusai pemilihan ditingkat internal partai, seyogyanya tidak ada mekanisme eksternal-partai yang dapat membatalkan keputusan demokratis yang telah dibuat di dalam partai. pemerintah, misalnya, selayaknya tidak diberikan kekuasaan birokratis

⁴⁵ Lance Castle, *Pemilu Dalam Konkes Komperatif Dan Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm, 16.

untuk melakukan seleksi akhir atas nama calon wakil rakyat yang diajukan partai.

- d. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih pada semua lapisan diberikan keleluasaan untuk tahu figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator itu dengan aspirasi politik mereka, dan mendiskusikan semua itu secara demokratis. Tentu saja keleluasaan-keleluasaan itu harus dilengkapi dengan keleluasaan lain: keleluasaan menentukan pilihan. Tanpa keleluasaan tersebut sebuah prosesi Pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”. Bahkan potensial mengubah Pemilu sebagai sebuah “pesta demokrasi” menjadi “pesta mobilisasi”.
- e. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Sebuah pemilu yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak: komite yang tidak berpretensi untuk merekayasa hasil akhir pemilu.
- f. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari prolog sebuah pemilu (penggalangan masa serta permasalahan ideologi dan program partai), dalam tahap rekrutmen dan penyeleksian calon anggota legislatif, hingga ke tahap kampanye dan tahap-tahap berikutnya. Penghitungan suara yang jujur. Adalah percuma memenuhi semua prasyarat diatas, manakala pada akhirnya tidak ada penghitungan suara yang jujur, dalam arti faktual dan transparan.

- g. Dalam praktik sistem politik manapun, prosesi pemilu tidak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Bagaimanapun manajemen pemilu adalah sebuah kerja birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis-kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalam pemilu.

3. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut rumusan penjekasan UU No. 15 tahun 1969, tentang pemilihan umum, yang masih berlaku sampai tahun pemilihan 1997, disebutkan bahwa tujuan pemilihan umum adalah: “Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan RI Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila UU 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum”.

Dengan demikian, diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Lembaga permusyawaratan/perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1945”. Maka yang tersimpul dalam tujuan pemilihan

umum diatas merupakan fundamental pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁶

Sedangkan tujuan pemilihan umum menurut UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah: “Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945”.

Adapun tujuan pemilihan umum menurut UUD No. 23, tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia”.⁴⁷

4. Pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara 2018

Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Sumut 2018 atau Pilgubsu 2018) dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2023. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Calon resmi dalam ajang pilkada ini adalah mantan Panglima Kostrad, Letnan

⁴⁶ A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 32

Jenderal Edy Rahmayadi, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Sedangkan bagi calon independen membutuhkan 764.578 suara minimal atau 6,5% jumlah pemilih di Sumatera Utara. Dukungan harus ditunjukkan dalam bentuk fotokopi KTP yang akan diverifikasi oleh KPU. Namun, tidak ada calon yang akan maju secara independen dalam pilkada ini

Edy Rahmayadi pertama-tama mendaftar di Partai Hanura pada Agustus 2017. Partai Gerindra, PKS dan PAN lalu menyatakan dukungan mereka pada akhir Desember 2017. Untuk turut serta dalam pemilu ini, Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad pada tahun 2018. Walaupun sempat menyatakan dukungannya kepada Tengku Erry Nuradi, Golkar dan Nasdem kemudian memutuskan untuk mendukung pasangan Edy Musa. Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap pasangan Edy-Musa pada tanggal 11 Mei 2018. Sikap Partai Demokrat ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Djarot Saiful Hidayat sebelumnya gagal dalam pilkada Jakarta 2017 dan sempat menjadi gubernur setelah Basuki Tjahaja Purnama masuk penjara akibat kasus penodaan agama. PDI-P menyatakan Djarot sebagai calon gubernur

Sumatera Utara pada tanggal 5 Januari 2018.⁴⁸ Djarot berpasangan dengan Sihar Sitorus, dan mereka berdua kemudian mendapatkan dukungan dari PPP, sehingga mereka memenuhi syarat untuk maju.⁴⁹

JR Saragih sudah mendaftar dari bulan Agustus dan ia mendapatkan dukungan resmi dari partai Demokrat pada bulan September. Menjelang batas waktu pendaftaran, PKB juga menyatakan dukungannya terhadap JR Saragih setelah kader PKB, Ance Selian, dijadikan calon wakil JR Saragih. Namun, JR Saragih didiskualifikasi oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat legalisir ijazah SMA. Ia kemudian dijadikan tersangka akibat dugaan pemalsuan ijazah dan juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Utara.

Walaupun petahana Tengku Erry Nuradi dapat maju kembali, ia gagal mendapat dukungan dari partai, dan partainya sendiri, Partai Nasdem, malah mendukung pasangan Edy-Musa. Sementara itu, Effendi Simbolon tidak maju karena partainya memutuskan untuk mengajukan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon.

Berikut adalah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal hasil suara pilkada Sumatera Utara 2018, yaitu:

⁴⁸ "Former Jakarta Governor to run for N. Sumatra Governor". Antara News. 7 January 2018. Diakses tanggal 27 January 2018.

⁴⁹ Zulfikar, Muhammad (10 January 2018). "PPP Resmi Usung Djarot - Sihar Sitorus di Pilgub Sumut". Tribun News. Diakses tanggal 27 January 2018.

Cagub-Cawagub	Perolehan suara	
	Pemilih	%
Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	3.291.137	57,58%
Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus	2.424.960	42,42%
Jumlah suara sah	5.716.097	98,45%
Suara tidak sah	90.770	1,55%
Jumlah suara sah dan tidak sah	5.806.867	100,00%
Partisipasi pemilih	5.806.867	61,78%
Pemilih terdaftar	9.399.324	100,00%
Sumber ⁵⁰		

⁵⁰ "REKAPITULASI: PILKADA PROVINSI SUMATERA UTARA". infopemilu.kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 11 Juli 2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menemukan jawaban dalam masalah-masalah , tujuan dan manfaat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka metode penelitian yang berjudul “Peran Pesantren dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan)” ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti.⁵¹ Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok secara faktual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat di pergunakan untuk mengambil keputusan dimasa mendatang.

Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) peneliti adalah instrumen kunci, (c) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, (e) makna yang dimiliki pelaku yang

⁵¹ Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.⁵²

Sedangkan ciri-ciri utama penelitian kualitatif yang dikemukakan Danim bahwa penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan walaupun ada angkanya hanya sebagai penunjang serta data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Ada beberapa pertimbangan peneliti sehingga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong berikut ini. *Pertama*, menyesuaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman peran bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Al Kautsar Al-Akbar Kota Medan. Tepatnya di Jl. Pelajar Ujung Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Adapun Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan beberapa alasan berikut; Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dan terdapat permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian sehingga subjek penelitian telah tercermin dalam fokus penelitian

⁵² Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004), hlm. 5.

ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian kualitatif diperlukan informan penelitian agar setiap informasi di dapat secara detail oleh peneliti.⁵³

Informan penelitian meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci (*key informan*), yaitu pimpinan pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan yaitu Syekh Ali Akbar Marbun, (2) informan utama, yaitu Kepala Yayasan sekaligus Pembina pesantren yaitu H. Khairul Amri, S.Pdi. Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.

C. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.⁵⁴ Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu:

Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan.sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pimpinan Pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan yaitu Syekh Ali Akbar Marbun atau Pembina pesantren yaitu H. Khairul Amri, S.Pdi.

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 115.

⁵⁴ Moleong, *Metodologi*, hlm. 157.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁵Data sekunder penelitian ini diperoleh dari lingkungan sekitar pesantren seperti buku, majalah, arsip, koran, gambar, dokumentasi yang ada kaitannya dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini. website resmi pondok pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan.

D. Instrument Pengumpul Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁵⁶ Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung mengenai peran pesantren dalam meningkatkan elektabilitas calon Gubernur dan wakil Gubernur pada pilkada Sumatera Utara 2018

2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview)

⁵⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82.

⁵⁶Burhan Bungin, *Ibid*, hlm. 120.

yang memberikan jawaban atau pertanyaan.⁵⁷ Wawancara terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Wawancara berstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaannya. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan penulisan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdiri, struktur organisasi pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan. Wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan informan yang ditemui secara langsung di pesantren al Kautsar al-Akbar Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh

⁵⁷Moleong, *Ibid*, hlm. 5.

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas lembaga.⁵⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang pengolahan datanya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat peneliti. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai trustworthiness (kebenaran) dipergunakan berbagai teknik, yaitu:

1. Kredibilitas

Kredibilitas identik dengan internal konsistensi yang dibangun sejak pengumpulan dan analisis data melalui tiga kegiatan, yaitu :

- a. Keterikatan yang lama (prolonged engagement) peneliti dengan yang diteliti memiliki konsekuensi memperpanjang waktu yang cukup guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian-penelitian. Untuk mencapai maksud ini maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik* (jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

- b. Ketekunan pengamatan (Persistent Observation) atau melakukan observasi menetap terhadap fakta-fakta yang muncul di lapangan penelitian.
- c. Melakukan triangulasi (triangulation), yaitu memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Menurut Moloeng, triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

2. Transferabilitas

Generalisasi dalam penelitian kualitatif tidak mempersyaratkan asumsi-asumsi seperti rata-rata populasi dan rata-rata sampel atau asumsi kurva norma. Transferabilitas memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar ruang lingkup studi.

3. Dependabilitas.

Dependabilitas dibangun sejak dari pengumpulan data dan analisis data lapangan serta saat pengkajian data laporan penelitian. Dalam pengembangan bersaing keabsahan data dibangun mulai dari pemilihan kasus dan fokus, melakukan orientasi lapangan dan pengembangan kerangka konseptual.

4. Komfirmabilitas.

Komfirmabilitas dilakukan dengan cara mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada pembimbing sejak dari pengembangan desain, refocusing, penentuan konteks dan narasumber, instrumentasi, pengumpulan dan analisis data serta penyajian data penelitian. Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi adalah

keabsahan sample/subjek, kesesuaian logika kesimpulan dan data yang tersedia, pemeriksaan terhadap bias peneliti, ketepatan langkah dalam pengumpulan data dan ketepatan kerangka konseptual serta konstruksi yang dibangun berdasarkan data lapangan. Setiap dari tahapan ini merupakan jaminan dalam mengembangkan komfirmabilitas penelitian.

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpulkan selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumen maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan.

Menurut Huberman & Miles, analisis data dikatagorikan kepada tiga tahap proses, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis terjadi sebelum pengumpulan data dalam membuat

rancangan penelitian, pada tahap pengumpulan data dan pelaksanaan analisis awal, serta setelah pengumpulan data sebagai hasil akhir.

a. Reduksi data.

Data yang didapat dalam penelitian akan direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk memudahkan dalam mengelompokkan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Lebih lanjut dijelaskan Miles dan Huberman mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data-data berupa matriks, grafik, jaringan kerja dan lainnya.

c. Kesimpulan

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial oleh para aktor diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen. Kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.⁵⁹

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*, Ibid, hlm. 245.

Data-data yang telah terkumpul akan diidentifikasi dan diklasifikasi, kemudian diperiksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengumpulan data tadi, lalu melakukan kegiatan mencatat ke dalam laporan penelitian, dan yang terakhir di sajikan dalam bentuk skripsi yang sudah sempurna. Namun untuk memperlancar kerja analisis dilakukan bersamaan dengan penelusuran data di lapangan. Dalam mengelola data ini, penulis menggunakan pendekatan sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pesantren al Kautsar al Akbar

Pendiri dari Pesantren Al Akbar ini adalah Syech Ali Akbar Marbun. Syech Ali Akbar Marbun lahir di desa Siniang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, letaknya 28 KM dari kota Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, atau 280 KM dari kota Medan.

Beliau adalah anak ke 7 dari 8 bersaudara, ayahnya Buyung Marbun (Alm) dengan Ibunya Hj. Chadijah br. Nainggolan (meninggal pada usia 105 tahun) adalah petani dan orang yang taat beragama Islam.

Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar, setelah tamat, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena sewaktu belajar di sekolah umum tidak mempelajari ilmu agama, maka setelah tamat dari SMP beliau pergi ke Bedagai Sei Rampah untuk belajar Alquran dan Ilmu Fiqh kepada Khalifah Umar yang terkenal dengan kalimannya di daerah Tanjung Beringin Serdang Badagai. Setelah belajar + 1 tahun kepada Khalifah Umar, beliau melanjutkan belajarnya kepada Syech Baringin Zainal Abidin seorang Alim dan Keramat dari Sei Senggiling Tebing Tinggi dan Syech Faqih Kayo dibidang Tauhid dan Taswwuf serta mengambil Tarikat Samaniyah selama + 1 tahun.⁶⁰

Selanjutnya beliau belajar ke Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Sumatera Utara yang didirikan

⁶⁰ Sumber: Humas pesantren al Kautsar al Akbar

oleh Syech Musthafa Husain Nasution yang pada waktu itu dipimpin oleh H. Abdullah Musthafa Nasution dan guru besarnya Syech Abdul Halim Lubis yang terkenal dengan sebutan Tuan Naposo.

Sambil belajar di Pesantren Musthafawiyah beliau juga belajar kepada seorang Alim dan Kramat Syech Abdul Wahab di Muara Mais dan Syech Abdul Majid Tambangan Tonga seorang ulama yang terkenal dalam bidang Fiqh, beliau-beliau ini semua belajar di tanah suci Mekkah dan tinggal di Tapanuli Selatan.

Selama belajar di Pesantren Musthafawiyah sewaktu libur Pesantren, beliau pergi ke Propinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Bonjol kepada Tuan Syech Muhammad Said seorang Alim dan Keramat dan pengikut Tarikat Naqsyabandiyah.

Setelah belajar di Pesantren Musthafawiyah selama 4 tahun, pada tahun 1969 Syech Ali Akbar Marbun menunaikan ibadah Haji ke Mekkah dengan menumpang kapal laut Ambolombo selama 2 minggu.

Setelah menunaikan ibadah haji, beliau tinggal bermukim di Mekkah untuk belajar. Mula-mula belajar di Masjidil Haram, karena pada masa itu Para Ulama terkemuka ramai mengajar di Masjidil Haram. Disanalah beliau belajar kepada Al-Fadhil Al-Alim Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang alim dan terpandang di tanah suci Mekkah dan termasyhur dalam bidang Hadits. Dan juga belajar kepada Sayyid Amin Al Kutbi, Sayyid Al-Arabi, Syech Thaha Yamani, Syech Muhammad Hindi, beliau juga belajar kepada Sayyid Hasan Fad'aq, Syech Muhammad Nur Saif, Syech Thaha As Syaibi, Sayyid Hamid Al-Kaff belajar dirumahnya selama di Mekkah.

Beliau juga belajar pada Madrasah As Saulatiah, salah satu Madrasah pertama yang didirikan di kota suci Makkah oleh Siti Saulatiah seorang perempuan kaya dari India.

Setelah belajar 4 tahun di Saulatiah, beliau melanjutkan belajar ke Perguruan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani sampai pulang ke tanah air. Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani adalah seorang ulama terkenal di mancanegara ini, anak dari Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki guru pertama Syech Ali Akbar Marbun. Maka pada tahun 1978 Syech Ali Akbar Marbun pulang ke Medan dan mendirikan Pesantren al-Kautsar al-Akbar.

Pesantren yang diasuh oleh KH Syech Ali Akbar Marbun ini mempunyai 700-an santri aktif dan telah meluluskan santri sebanyak 23 angkatan sejak pertama kali berdiri.

Secara sistem, Pesantren al-Kautsar al-Akbar menganut pondok modern. Tetapi dalam proses pengajaran dan pendidikan, kami menerapkan sistem salafiyah. Dengan kolaborasi dua sistem tersebut, akan berdampak pada kualitas santri dan lulusannya. Santri tidak hanya dibekali ilmu-ilmu umum, tetapi juga mengkaji kitab-kitab karya ulama klasik secara aktif.

Selain menerapkan kurikulum Kemdikbud dan Kemenag, pesantren ini tetap mengutamakan kurikulum pesantren dengan mengkaji berbagai kitab klasik seperti, Tafsir, Hadits, Fiqih, Tasawuf, Akhlaq, Tauhid, Nahwu, Shorof, Balaghoh, dan lain-lain. Dengan berlandaskan akidah Ahlussunah wal Jama'ah, imbuhnya, pesantren ini berupaya mencetak generasi muda NU dengan karakter ke-NU-an yang kuat.

Alumni Santri tersebar dari berbagai wilayah, khususnya Sumatera bagian Utara, diantaranya dari Aceh, Riau, Lhouksemawe, Kepulauan Riau, serta sebagian juga ada yang berasal dari pulau Jawa.

Untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, pesantren ini sering mengadakan belajar-mengajar di alam terbuka mengingat luas dan asrinya lingkungan pondok. Diantara kegiatan yang seringa diadakan di alam terbuka yaitu praktik bahasa Arab dan Inggris.⁶¹

B. Pesantren dan politik

Aset politik yang terkandung dalam pondok pesantren yang besar menjadikannya sering kali menjadi rebutan partai politik dan para kandidat kepala daerah. Posisi inilah yang mendatangkan godaan politik yang cukup mempesona bagi pesantren. Aset politk yang dimiliki pesantren membawanya untuk memilih dua opsi sikap yang sama-sama mengandung risiko dan membawa konsekuensi baik internal maupun eksternal. Pesantren bebas menentukan pilihannya.⁶²

Pertama, pesantren bersikap netral dan independen, tidak terjun langsung ke medan politik praktis. Pesantren berkonsentrasi penuh pada bidangnya, yaitu mendidik masyarakat mencerdaskan dan membentuk masyarakat yang shalih secara spiritual dan sosial tanpa bersinggungan langsung dengan politik praktis. Konsekuensi dari sikap netral ini mungkin akan tidak mendapatkan bantuan yang biasanya dijanjikan atau diberikan oleh partai atau seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau Gubernur.

⁶¹ Sumber: Humas pesantren al Kautsar al Akbar

⁶² Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 43

Sebagaimana maklum bahwa pesantren, baik secara fisik maupun mental dibangun sendiri oleh Kiayinya dengan bantuan seadanya dari masyarakat. Apabila sang Kiyai memang kaya dan mempunyai jaringan silaturahmi yang luas, khususnya dengan mereka yang beruang maka pesantren akan lebih cepat maju, khususnya bangunan fisiknya. akan tetapi sebaliknya, jika sang Kiyai sebagai pengasuh hidup pas-pasan, tidak mempunyai jaringan dan dukungan masyarakat tidak maksimal maka biasanya pesantren akan susah berkembang. Kondisi inilah yang biasanya mengundang partai atau seseorang yang mempunyai kepentingan politik untuk datang dengan membawa misi politik dengan imbalan mendapatkan dukungan. lebih-lebih jika pesantren tersebut mempunyai santri yang banyak, maka bisa menjadi komoditas dan aset politik yang sangat berharga.

Kedua, pesantren atau Kiai pengasuhnya ikut terjun ke dunia politik dengan mendukung partai politik atau tokoh politik tertentu. Dengan ikut mendukung politik tertentu ini biasanya pesantren akan mendapat *reward* dari partai atau pasangan calon yang didukung. Bantuan biasanya diberikan untuk membangun sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan di pesantren. Namun demikian ada sisi negatif apabila pesantren ikut politik yaitu akan terjadi kesenggangan dengan masyarakat atau pesantren lain yang netral atau mendukung partai atau tokoh politik yang berbeda dengan pesantren tersebut. Bahkan, dengan kedewasaan berdemokrasi, tidak jarang para santri di suatu pesantren berbeda pandangan dengan kiai yang mendukung partai atau politik tertentu meninggalkan pesantren tersebut.

Dari dua opsi di atas, gambaran pesantren al Kautsar al Akbar berada pada wilayah yang kedua, namun ada sedikit penambahan seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, beliau mengatakan:

“secara politis, kami (pesantren al Kautsar al Akbar) tidaklah begitu aktif. Karena fokus kami itu pendidikan Islami, namun dalam proses pesta demokrasi berupa pemilu atau pilpres, pilkada, kami sering kedatangan elite politik dan partai politik. sebagai tuan rumah, kami menjamu dengan baik. Dan apabila kami terlibat dalam mendukung pasangan atau partai, jelas syaratnya adalah yang memberikan dampak kepada kemaslahatan umat Islam dan sudah mempunyai bukti nyata hasil kerjanya”.⁶³

Kedua opsi di atas mempunyai konsekuensi masing-masing. Yang jelas alangkah lebih elegannya apabila Kiai dengan pondok pesantrennya bersikap netral. Kepentingan politik hanya terbatas baik ruang dan waktunya. Hendaknya berfikir lebih jernih bahwa politik hanya menghentikan langkahnya kepada kepentingan sesaat, padahal pesantren akan terus melangkah tanpa henti untuk mengkawal umat ini.

Pesantren dan politik seakan saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Pesantren tentu saja butuh pengakuan secara politik sebagai bagian dari penegasan identitas dirinya di tengah masyarakat budaya. Identitas kesiantrian yang mewujud dalam

⁶³ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

diri para politisi, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, atau para aktivis sosial menjadi sangat penting dan berperan di tengah kecenderungan yang masih kental terhadap perspektif politik aliran yang sampai saat ini masih belum juga memisahkan diri dari ruang-ruang budaya politik.

Dalam perjalanannya, wajar jika kemudian pesantren sulit dilepaskan dari berbagai dimensi politik, karena politik juga sesungguhnya terkait erat dengan segala kegiatan bagaimana menyerap setiap kultur sosial kedalam tradisi politik. Setiap partai politik, pasti akan mengusung ideologi-ideologi yang memiliki kesesuaian dan atau penguatan terhadap entitas kultur yang bersifat kebangsaan yang diambil dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benar-benar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah ada sejak dulunya, saling berkait dan saling membutuhkan.

Sulit untuk melepaskan politik aliran yang mewujud dalam berbagai partai politik atau elite politik, walaupun sejauh ini mereka senantiasa mengklaim sebagai partai modern yang lebih mengedepankan cara pandang politik demokratis yang relatif lebih rasional. Buktinya, hampir di setiap momentum kontestasi politik, ideologi-ideologi politik aliran selalu muncul mewarnai langkah-langkah taktis kepolitikan mereka.

C. Peran Pesantren al-Kautsar al-Akbar Kota Medan dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018

Pesantren selalu saja menjadi ramai di saat-saat momentum kontestansi yang terus dieksploitasi demi tujuan-tujuan kepentingan politis. Para elite politik secara bergantian mendatangi pesantren dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Tak terkecuali pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar,

“Dalam pilgub Sumatera Utara 2018 tahun ini, calon Gubernur dan wakil Gubernur mendatangi pesantren al Kautsar al Akbar. Pasangan Edi Rahmayadi itu datang sebanyak 2 kali. Sedangkan pasangan Dajrot dan Sihar Sitorus itu datang sebanyak sekali saja”.⁶⁴

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan pasangan calon tersebut mendatangi pesantren al Kautsar al Akbar, beliau mengatakan:

“Maksud dan tujuan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur pada awalnya hanya sekedar silaturahmi, karena mereka mendapat amanat atau arahan dari ketua partai pengusung masing-masing calon untuk datang silaturahmi ke pesantren al Kautsar al Akbar, lalu

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

meminta dukungan ke pesantren ini. Selain itu ada juga dialog politik tertutup kepada Syech Ali Akbar Marbun sebagai pendiri ponpes”.⁶⁵

Dalam menyimpulkan apakah pesantren berperan dalam meningkatkan elektabilitas pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur di Pilkada Sumatera Utara 2018, berikut pernyataan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, beliau mengatakan:

“Jika dicermati pemilihan Gubernur dalam beberapa periode kebelakang, pesantren al Kautsar al Akbar jelas dapat memberi peran dalam meningkatkan elektabilitas pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur. Artinya setiap paslon yang kami (pesantren al Kautsar al Akbar) dukung, itu selalu menang. Lalu dalam pilkada Sumatera Utara 2018 yang sudah berlangsung kemarin, kami hanya sebatas memberi dukungan penuh kepada salah satu pasangan calon, dan seperti data di lapangan elektabilitas calon tersebut cukup tinggi sehingga calon tersebut menang. (calon yang dimaksud ialah pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksa)”.⁶⁶

Ketika ditanya mengenai Pilgub Sumatera Utara 2018 yang telah usai dilaksanakan bulan Juni kemarin, beliau mengatakan:

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

“Pada Pilgub Sumatera Utara kemarin kami (pesantren al Kautsar al Akbar) terutama pendapat tuan Syech Ali Akbar Marbun tentunya memberikan dukungan kepada pasangan yang akan memberikan kontribusi terhadap umat Islam di Sumatera Utara, yang dalam kasus ini jatuh kepada pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksa. Namun begitu, kepada pasangan yang lain kami tetap memberikan sikap yang baik”.⁶⁷

Ketika ditanya mengenai alasan pesantren mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksa, beliau mengatakan:

“Sebelum menjadi calon Gubernur, Edy Rahmayadi sudah berbuat untuk umat Islam Sumatera Utara. Seperti sumbangan untuk masjid agung, dan bantuan sosial lain. Ketika datang beberapa kali ke pesantren ini, beliau memberikan sambutan dan arahan yang positif di lingkungan pesantren”.⁶⁸

Dalam dialog politik antara pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, tak jarang Pesantren mengajukan kerjasama terhadap pembangunan jangka panjang umat Islam ke depan.

“Jika memang harus melakukan kampanye politik atau terlibat langsung dalam program kerja dari pasangan calon Gubernur, maka pihak

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

pesantren akan menyanggupinya asalkan kepada pasangan calon tersebut menampung aspirasi kami (pesantren al Kautsar al Akbar). Jadi semacam ada kerjasama antara kedua belapihak dalam kemaslahatan umat Islam khususnya”.⁶⁹

Hal semacam ini sudah berlangsung cukup lama di lingkungan pesantren, terlebih jika setiap pemimpin pesantren memiliki hubungan dengan berbagai kekuatan politik yang ada. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benar-benar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah ada sejak dulunya, saling berkait dan saling membutuhkan.

Para elite politik yang dalam kasus ini adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur melihat pesantren sebagai wadah dalam meningkatkan elektabilitas mereka di masyarakat. Selain karena pesantren merupakan tempat agamis, tempat yang mudah mendulang simpati dan empati masyarakat maupun jajaran pesantren (santri dan alumninya), juga sebagai tempat untuk mencari dukungan kyai. Karena kyai merupakan pusat dari kegiatan yang ada dalam pesantren tersebut.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak H. Khairul Hami sebagai Ketua Yayasan dan juru bicara pesantren al Kautsar al Akbar, pada tanggal 11 Oktober 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pesantren merupakan suatu tempat untuk menimba ilmu agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri. Pesantren al Kautsar al Akbar merupakan salah satu pesantren di Kota Medan yang diasuh oleh KH Syech Ali Akbar Marbun, mempunyai 700-an santri aktif dan telah meluluskan santri sebanyak 26 angkatan sejak pertama kali berdiri. Secara sistem, Pesantren al-Kautsar al-Akbar menganut pondok modern. Tetapi dalam proses pengajaran dan pendidikan, kami menerapkan sistem salafiyah. Dengan kolaborasi dua sistem tersebut, akan berdampak pada kualitas santri dan lulusannya. Santri tidak hanya dibekali ilmu-ilmu umum, tetapi juga mengkaji kitab-kitab karya ulama klasik secara aktif.

Mengenai hubungan pesantren dan politik keduanya saling berkaitan menjadi semacam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling berkontribusi di dalamnya. Sulit untuk beranggapan bahwa pesantren benar-benar bersih dari unsur politik, karena pesantren dan politik, telah menjadi dua entitas yang telah ada sejak dulunya, saling berkait dan saling membutuhkan.

Peran pesantren al Kautsar al Akbar dalam meningkatkan elektabilitas calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 terlihat dalam bentuk dukungan yang diberikan pesantren terhadap salah satu pasangan calon. Dukungan tersebut diberikan berdasarkan tindakan nyata yang diberikan paslon buat umat Islam Sumatera Utara. Lewat dukungan tersebut nantinya akan berdampak kepada elektabilitas paslon dalam tingkat keterpilihannya

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada umat Muslim pada umumnya dan kepada para peminat kajian politik dan pesantren, khususnya yang berada di wilayah Kota Medan untuk lebih komprehensif dalam mempelajari dan mengkaji lalu menerapkan pembahasan tersebut.
2. Kepada para peneliti yang hendak meneliti tentang hubungan politik dan pesantren agar benar-benar teliti dalam menempatkan pembahasannya.
3. Dan yang terakhir untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini kiranya bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran seputar isi yang telah disajikan.

DAFTAR WAWANCARA

A. Data informan

Nama :

Jabatan/pekerjaan :

Alamat :

Waktu :

B. Daftar pertanyaan

1. Menurut Bapak bagaimana hubungan politik dan pesantren?
2. Bagaimana sikap pesantren jika ada elite politik (paslon Gubernur dan wakil Gubernur pilkada Sumut 2018) datang berkunjung ke pesantren?
3. Apa peran kedatangan paslon Gubernur dan wakil Gubernur ke pesantren al Kautsar al Akbar?
4. Adakah peran pesantren al-Kautsar al-Akbar Kota Medan dalam meningkatkan elektabilitas paslon Gubernur dan wakil Gubernur pada pilkada Sumut 2018?
5. Apa harapan pihak pesantren terhadap Gubernur terpilih pada pilkada Sumut 2018?

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007
- Ahmad Abidin Zainal, *Ilmu Politik Islam I*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1977
- Amin Ahmad, *Islam dari masa ke masa*, Bandung, Rosyada, 1987
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*, jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Asrohah Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Azra Azyumardi, *Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia*, Indo Islamika, 2012
- Azra Azyurmadi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandidrabadi , 2008
- Budiardjo Miriam, *Edisi Revisi, Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010
- Castle Lance, *Pemilu Dalam Konkes Komperatif Dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Chidmad Tatang, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Jogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Hasan M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- infopemilu.kpu.go.id.
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

- Kusumawati Eri, "*Kyai dan Politik Praktis*" SH.Skrip, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012
- Langgulong Hasan, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Mariana Dede & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2008
- Mastuhu, *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS.1994
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004
- Mulkhan A.M., *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Pendidikan Islam dan Dakwah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994
- Nafi M. Dian dkk, *Praksi Pembelajaran Pesantren*, Yogyakarta, Institute for Training and Developmen (ITD), Forum Pesantren, Yayasan Selasih, 2007
- Nata Abudin, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga pendidikan Islam*. Jakarta: Gradsindo. 2001
- Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Rosda, 2009
- Patoni Ahmad, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004
- Prihatmoko Joko J, *Pemilihan Kepada Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Qomar Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Rahim Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Rais M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001
- Rosida Rofiatul, "*Kyai dan Partai Politik*" SH.Skrip, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2010
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Zaini Abdul Wahid, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 1996

Zainuddin Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama press. 2005

Zuhro Siti dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*, Yogyakarta: Ombak, 2009